

PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BHINEKA SURABAYA TENTANG UCAPAN BASUKI TJAHAYA PURNAMA DI KEPULAUAN SERIBU YANG DI ANGGAH MENISTAKAN AGAMA

Prayogo Samsul Ibrahim

12040254252 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) prayogosamsul2@gmail.com

Warsono

0019056003 (PPKn, FISH, UNESA) warsonounesa@gmail.com

Abstrak

Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta, para elit partai politik sudah mempersiapkan kandidatnya untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Tidak terkecuali Basuki Tjahaya Purnama yang juga akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun di samping itu berbagai polemik mengenai kasus Basuki Tjahaya Purnama yang di anggap menistakan agama islam semakin membuat suasana Pilkada semakin panas. Selain itu, banyak isu SARA yang menyudutkan Basuki Tjahaya Purnama yang kini di tetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penistaan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif .Dalam penelitian ini informan yang akan di wawancarai adalah anggota dari Lembaga Bhineka Surabaya yaitu Ricky Bram Imania, Cristover Oktavianus, Ronald Putra dan Silvania Alyindra. Semuanya adalah pengurus harian Bhineka Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya menilai ucapan Basuki Tjahaya Purnama melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan makna referensial. Dimana para informan memaknai ucapan Basuki Tjahaya purnama yang di anggap menistakan agama secara referen. Kemudian para informan juga memaknai dengan pendekatan makna Ideasional yaitu memaknai ucapan dengan melihat tata letak bahasa. Dan yang terakhir yaitu memaknai dengan menggunakan pendekatan makna behavioral. Yaitu memaknai bahasa dengan melihat dari keadaan social budaya serta kondisi di suatu daerah. Sehingga dapat di simpulkan apakah ucapan Basuki Tjahaya Purnama merupakan suatu penistaan atau justru suatu edukasi politik.

Kata Kunci: Penistaan, makna dan anggota Bhineka Surabaya

Abstract

Towards the election of the governor of DKI Jakarta, the elite of political parties have prepared their candidates to fight in the elections DKI Jakarta. No exception Basuki Tjahaya Purnama who will also be forward as a candidate for Jakarta governor. But in addition to the various polemic about the case of Basuki Tjahaya Purnama which is considered to insult Islam increasingly makes atmosphere getting warm. In addition, many racial issues that point to Basuki Tjahaya Purnama which is now set by the police as a suspect in the case of defamation of Religion. This research is a qualitative research. In this research the informant who will be interviewed is a member of Bhineka Surabaya, they are Ricky Bram Imania, Cristover Oktavianus, Ronald Putra dan Silvania Alyindra. All of the are daily ,manager of Bhineka Surabaya Data were collected using observation, deep interview and documentation. The members of Bhineka Surabaya Institute evaluated Basuki Tjahaya Purnama's remarks through three approaches namely the referential meaning approach. Where the informants interpret Basuki Tjahaya' speech as considered to denounce religion by referent. Then the informants also interpreted by ideational meaning approach as interpretation of speech by looking at the layout of the language. And the last is to interpret by using behavioral meaning approach. Namely interpret the language by looking at the state of social culture and conditions in an area. So it can be concluded whether the utterance Basuki Tjahaya Purnama is a blasphemy or even a political education.

Keyword : Sacrilege, meaning and members Bhineka Surabaya

PENDAHULUAN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, Jumat 7 oktober 2016 dilaporkan Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) ke polisi atas kasus penistaan agama. Syamsu Hilal Chaniago selaku ketua FUPA menyebut Ahok telah melakukan pelanggaran hukum serius dan harus diusut tuntas.

Laporan itu masuk ke Polda Metro Jaya dengan nomor TBL/4558/X/2016/PMJ/Dit Reskrim. “Kami menyatakan memprotes keras perkataan Basuki Tjahaja Purnama bahwa adanya penistaan agama ini,” kata Syamsu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Ahok dituding melecehkan agama dengan mengutip ayat Al Quran saat berkunjung ke Kepulauan

Seribu pada 27 September 2016. Dalam video yang viral itu, Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia juga mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Bagi Syamsu, sebagai umat Islam, ia memprotes tindakan Ahok. Ini penghinaan. Sebagai umat non-Islam, Ahok di anggap melecehkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam. FUPA terdiri dari Kauman (Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah seNusantara), Ika Umsu (Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Sejabodetabek), Ikalum UMJ (Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan Yayasan Lakmi (Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia). Tak lama setelah FUPA melapor, giliran Pemuda Muhammadiyah melaporkan hal yang sama. Pedri mengkhawatirkan pernyataan Ahok akan menuai reaksi umat Islam.

Para Pemuda Muhammadiyah berharap kepolisian mengusut tuntas kasus penistaan ini. Pedri mengharapkan kepolisian dapat bekerja dengan baik dan mengusut tuntas kasus Ahok. Sebelumnya, tidak merasa pernah menghina ayat suci dalam Al Quran. Di balik viral video Ahok yang tersebar luas di media, semua itu tak lepas dari peran Budi Yani, seorang dosen London school yang kini juga di tetapkan sebagai tersangka karna di anggap menyalah gunakan social media sebagai alat profokatif.

Beberapa pegiat kebebasan beragama tetap meminta kepolisian untuk tetap serius menyelesaikan kasus dugaan menyebarkan kebencian atas dasar SARA terkait tersangka Budi Yani. Buni Yani yang sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, dikenakan pencegahan ke luar negeri, namun tidak ditahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan status tersangka itu bukan terkait penyebaran video, tapi menyangkut tiga paragraf tulisan Budi Yani yang dianggap menyebarkan kebencian. "Kalimat ini yang tidak ada dalam video, ini yang menambah, menyebarkan informasi terkait dengan rasa permusuhan, rasa kebencian yang berdasarkan SARA. Ini yang kita ulas," kata Awi Setiyono dalam jumpa pers, Kamis sore. Buni Yani dikenakan pencegahan ke luar negeri namun tidak ditahan. Buni Yani jadi tersangka karena 'makna tulisannya' di Facebook. Diperiksa polisi, Buni Yani bantah sebagai pengunggah video pertama Ahok

Namun demikian, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mempertanyakan penggunaan pasal 27 dan 28 terkait penyebar kebencian terkait SARA dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggapnya multitafsir. Pasal 27 berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan pasal 28 berkaitan dengan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Walaupun tidak spesifik

membahas kasus Budi Yani, pengamat media sosial Damar Juniarto mengatakan, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE kerap kali digunakan bukan pada porsinya. Yaitu pada penghukuman mereka-mereka yang dianggap melanggar pasal pidana cybe. Dia menganggap pasal-pasal ini lebih sering dipelintir oleh pengadunya untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan penodaan agama atau pengancaman. Karenanya, Damar sependapat jika pasal pelanggaran agama itu dihilangkan dari Undang-Undang ITE. pencemaran nama baik dan penodaan agama sudah ada rumusannya dalam KUHP. Menurutnya, duplikasi pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Dan karenanya merugikan banyak orang.

Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam telah melakukan aksi demo secara besar-besaran pada 4 november 2016. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili lantaran diduga telah melakukan penistaan agama. Ahok dianggap telah menghina umat Islam berawal ketika dia mengutip Surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.

Ketua umum FPI, Habib Rizieq Shihab yang sejak awal melawan Ahok makin keras agar mantan Bupati Belitung Timur itu segera diadili. Habib Rizieq telah dimintai keterangan oleh Bareskrim sebagai saksi ahli atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Rizieq menegaskan akan mengawal kasus dugaan penistaan agama sampai tuntas. Sebab ucapan Ahok sudah melukai umat muslim di seluruh Indonesia. Dalam aksi demonstrasi, Rizieq bersama ribuan massa meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan tidak mengintervensi kasus yang menjerat Ahok. Presiden diminta untuk menegakkan konstitusi dan memproses hukum bagi siapa saja yang melakukan penistaan agama, tak terkecuali dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Dia berharap Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bertekad sebagaimana yang sering disampaikan bahwa Ahok sudah melakukan penistaan agama sehingga harus diperiksa dan dijadikan tersangka supaya bisa ditangkap. Sedangkan Kabareskrim Irjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, Rizieq diperiksa sebagai saksi ahli. Setidaknya ada 22 saksi bakal diperiksa kasus Ahok ini.

Bareskrim memastikan kasus dugaan penistaan agama dilakukan Ahok berjalan tegas. Ari menambahkan, terdapat tidaknya pelanggaran pidana dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sampai saat ini belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap penyelidikan. Ahok sendiri menjalani diperiksa Bareskrim sebagai saksi dalam kasus itu pada tanggal 7 november dan di tetapkan sebagai tersangka

Hal ini membenarkan hipotesa yang pernah ada (Suparlan1982:46) bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keseimbangan hubungan kekuatan antara masyarakat-masyarakat sukubangsa dengan sistem nasional bercorak ekuilibrium. Apabila sistem nasional diperkuat sehingga menjadi kekuatan absolut, masyarakat-masyarakat sukubangsa akan secara formal menjadi lemah. Kekuatan sosial politik masyarakat sukubangsa ini kemudian akan tersembunyi dalam berbagai bentuk sakit hati yang sesekali terungkap sebagai lelucon atau memunculkan diri dalam berbagai bentuk pemberontakan terselubung, yang akan meledak sebagai sebuah pemberontakan terbuka pada waktu sistem nasional itu lemah.

Pada saat sistem nasional lemah, masyarakat-masyarakat sukubangsa yang merasa tertekan itu akan mencoba membebaskan dirinya dari kungkungan sistem nasional untuk menjadi sebuah satuan tatanan politik atau negara sukubangsa. Cara yang ditempuh adalah dengan menghancurkan berbagai kelompok sukubangsa pendatang yang selama ini dianggap merugikan dan merupakan kepanjangan kekuasaan sistem nasional. Kemudian, barulah mereka mengonsolidasi diri untuk melawan sistem nasional seperti yang terjadi di Aceh. Masyarakat Aceh menghancurkan dan mengusir semua pendatang asal pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia, serta para pendatang yang bukan Islam. Hal itu merupakan semacam gerakan nativistik untuk pemurnian Aceh

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa seringkali pluralitas, tepatnya keanekaragaman etnis, berpotensi merusak tatanan sosial budaya sebuah komunitas atau masyarakat secara umum. Saat ini, hampir semua wilayah di Indonesia terbilang heterogen secara etnis. Kelompok Arab, Tionghoa, Jawa, Minang contohnya tersebar hampir di setiap bagian di wilayah Indonesia. Seiring dengan kedatangan mereka, yang berbaur dengan penduduk asli serta kelompok etnis lainnya yang membuat suatu komunitas tidak hanya di kota-kota melainkan juga di desa, dapat menjadikan hubungan antar kelompok tersebut lebih interaktif. Hal ini pulalah yang terkadang dapat mendatangkan masalah baru dalam mengakomodasi perbedaan kultur yang terjadi dalam masyarakat.

Potensi disintegrasi sosial budaya dapat dilihat sebagai hasil dari persaingan antar individu dan antarkelompok yang saling memperebutkan sumber daya-sumber daya tertentu, interaksi antar kelompok etnis yang apabila tidak didukung dan didasarkan atas semangat kekeluargaan dan tenggang rasa maka akan membawa kelompok-kelompok etnis tersebut yang dalam suatu tatanan masyarakat dan pada keadaan tertentu dapat

menghancurkan integrasi sosial pada tingkat lokal maupun nasional.

Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya (INIS, 2003: 85). Disintegrasi sosial budaya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal yaitu kebencian terhadap kelompok minoritas atau etnis tertentu serta peranan para pemimpin dalam kelompok etnis tersebut. Sedangkan faktor eksternal meliputi terpuruk dan pudarnya kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Namun, etnis sendiri tidak dapat menyebabkan disintegrasi sosial. "Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu: pengendalian terhadap konflik serta penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu dan membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu." Persaingan dalam memperebutkan sumberdaya dan kedudukan, pemarginalan suatu etnis tertentu, serta perselisihan untuk melenyapkan pihak lainlah yang merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan disintegrasi dan disorganisasi sosial.

Dilihat dalam perspektif demografis, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara yang homogen, tetapi sebaliknya sebagai negara yang plural dan heterogen. Pluralisme demografis telah menyebabkan munculnya pluralisme budaya atau multikulturalisme yang merupakan karakter khusus dari bangsa Indonesia yang sifatnya sebagai negara maritim dipisahkan oleh samudra, laut, selat, pegunungan, dan sebagainya (INIS, 2003: 99). Karena berbagai batas alam yang membagi secara geografis, maka Indonesia terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil yang didiami oleh berbagai kelompok etnis dan subetnis yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh Kalimantan yang terdiri dari empat provinsi, dimana disetiap provinsi mempunyai berbagai kelompok etnis, kelompok subetnis, berbagai budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan agama yang berbeda. Kelompok ini termasuk Dayak, Banjar, Melayu, demikian juga warga keturunan Cina (orang Tionghoa), Arab, India, Belanda, dan keturunan Eropa lainnya. semua kelompok ini mempunyai sistem nilai budaya, adat istiadat, atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu sama lain.

Perbedaan budaya yang muncul dalam masyarakat yang plural secara budaya menuntun bangsa Indonesia untuk membangun sikap yang mampu memahami perbedaan dan berkomunikasi secara lebih baik. kebebasan berbudaya Tionghoa dan perbaikan sistem hukum dan HAM membawa angin segar pada etnis Tionghoa. Budaya Tionghoa tidak lagi dianggap budaya asing, bahkan diakui sebagai salah satu budaya

nasional Indonesia. Agama Khonghucu yang identik dengan Tiongkok diakui sebagai salah satu Agama resmi. Tokoh-tokoh etnis Tionghoa pun mulai berani mencalonkan diri di bursa politik Indonesia. Dalam diri mereka nyata sudah, walaupun berbudaya Tionghoa tapi nasionalisme mereka adalah Indonesia. Dunia terdiri dari berbagai Negara-Bangsa dan sebuah Negara-Bangsa terdiri dari berbagai kelompok dalam sebuah masyarakat. Kelompok yang beragam mungkin saja didasarkan atas ras, etnis, agama, atau latar belakang sosial lainnya. sebuah nilai yang memandang pluralitas secara positif disebut pluralisme (INIS,2003:174).

Di masa Reformasi sendiri telah banyak meahirkan organisasi – organisasi nirlaba atau organisasi non-provit yang bergerak dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), Politik, mengkritisi sejarah, juga menekuni permasalahan yang erat kaitanya dengan “Bhineka Tunggal Ika”, ini membuktikan sedikit demi sedikit masyarakat Indonesia telah sadar akan pentingnya semboyan Bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, seperti Lembaga Bhineka Surabaya yang giat menggelar diskusi serta aksi social yang tentunya untuk menjunjung tinggi Kebhinekaan yang ada di tanah air Indonesia. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah oleh karena perbedaan-perbedaan etnis serta kultur yang dibawa baik itu dari etnis Tionghoa sendiri maupun dari etnis lainnya. Jika masyarakat Indonesia siap menerima bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang plural secara esensial, maka masyarakat dapat hidup secara damai apabila semuanya dapat merasakan tinggal di rumah sendiri di dalamnya, agar tidak ada satu orang pun dari suatu kelompok etnis merasa diasingkan. Dengan kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia, kita akan mampu hidup bersama dalam sebuah visi masa depan yang kuat berdasarkan solidaritas.

Masyarakat memiliki posisi sentral dalam mencegah terjadinya konflik antar suku,ras,budaya,agama, dan gender. Segala perilaku masyarakat akan dapat memicu terjadinya konflik itu sendiri, maka dari itu masyarakat harus menjaga perilaku serta norma yang berlaku di Indonesia. Sikap sentiment antar suku,ras agama dan gender biasanya diawali dengan konflik antar personal saja yang kemudian orang yang bersangkutan mengangkat issue kelompok bahkan suku budaya dan sebagainya sehingga timbul konflik antar golongan. Maka dari itu masyarakat sendiri harus membekali diri dengan sikap kritis, analitis serta antisipatif yang kuat agar tidak terjebak oleh sikap latah dalam menerima informasi ataupun sikap apriori dalam menolak suatu hal, kemudian masyarakat juga harus menanamkan sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan

rukun. Kemudian masyarakat juga harus memahami konsep kebhinekaan yang sudah di gagas oleh leluhur nusantara sebagai bangsa yang satu di tengah kemajemukan dan keberagaman.

Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam penegakan hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, sehingga dalam upaya ini pemerintah akan lebih memiliki banyak kendali. pihak pemerintah dapat mengagendakan suatu kegiatan yang dapat mempersatukan antar golongan sehingga masyarakat akan lebih rukun serta menghargai keberadaan masyarakat lain yang berbeda latar belakang,kemudian di dalam membuat kebijakan diharapkan pemerintah lebih bijaksana supaya kebijakan itu menguntungkan suatu kelompok namun merugikan kelompok yang lain. Kemudian di jajaran pemerintah sendiri mereka harus menjaga sikap serta tutur kata, jangan sampai mengeluarkan ucapan yang sekiranya menyinggung suatu kelompok, dan jika ada pertentangan atau konflik pribadi segera diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus mengangkat issue kelompok atau suku ras budaya agama dan sebagainya yang dapat memperkeruh keadaan.

Dalam penegakan hukum sendiri pemerintah dapat membuat peraturan hukum bagi seseorang yang memprovokasi suatu kelompok yang di anggap akan menimbulkan sentiment kelompok. Kemudian pemerintah juga dapat mengagendakan pertemuan rutin pemuka suku,agama untuk membicarakan keadaan dilapangan dan menjalin silaturahmi agar kedepannya masyarakat kita terhindar dari konflik yang mengangkat issue agama,ras,suku,budaya dan gender. Pemerintah juga bisa bergerak lewat dunia pendidikan dimana jiwa toleransi serta menghargai akan mudah di tanamkan pada diri anak sejak dini, pemerintah dapat memberi penanaman sikap tersebut lewat kurikulum pendidikan agar di jangka panjang masyarakat kita dapat hidup rukun,saling menghargai ,menjaga budaya nusantara yang ada dan mengakui keberagaman serta kekayaan nusantara secara lisan juga perbuatan.

Setelah masa kekuasaan rezim Orde Baru berakhir kebebasan menyampaikan pendapat serta kebebasan pers semakin mendapat ruang yang lebih luas untuk lebih berekspresi, sehingga banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mulai bermunculan di ranah public dan bergerak sesuai ranah keilmuannya masing – masing khususnya di kota Surabaya. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di masing – masing bidang. Lembaga Bhineka Surabaya yang didirikan oleh Soe Tjen Marching adalah Organisasi nir-laba yang mengampanyekan kebhinekaan melalui majalah dan diskusi. Salah satu tujuan utamanya adalah mempromosikan keberagaman di Indonesia (baik agama,

kepercayaan, etnis dan tradisi) serta meluruskan sejarah yang telah dimanipulasi oleh penguasa (misalnya sejarah tentang pembunuhan massal 1965, pembunuhan Munir dan tragedi '98).

Lembaga Bhineka Surabaya mempunyai cabang di beberapa kota, antara lain Malang, Jakarta, Bali, Bandung, Yogya, Solo dan Samarinda. Kegiatan: (1) Penerbitan Majalah (2) Diskusi sesuai tema Majalah Bangsa Indonesia patutnya bersyukur karna masyarakat serta pemuda bangsa masih ada yang peduli dengan keadaan negri ini. Banyaknya isu rasial serta sentiment agama yang selalu ramai di negri ini menjadi salah satu pemicu di dirikanya lembaga Bhineka Surabaya. Bagi pendiri Lembaga Bhineka Surabaya yaitu Soe Tjen marching suatu kebanggaan bisa melihat pemuda – pemuda Indonesia yang peduli dengan keadaan negri nya sendiri. Berdirinya lembaga Bhineka adalah suatu kebahagiaan yang selalu ia syukuri dan kedepanya diharapkan lembaga Bhineka Surabaya dapat memberi kontribusi yang lebih. Sebagai bangsa yang heterogen toleransi adalah modal utama yang harus dimiliki masyarakat Indonesia. Jiwa kemanusiaan adalah satu hal yang tak bisa di lepaskan dalam hidup bermasyarakat dan Bhineka Tunggal Ika adalah senjata ampuh dalam mempererat hubungan antar suku, agama dan budaya. Lemahnya lembaga Hukum di Indonesia, sikap apatis dari masyarakat Indonesia sendiri serta berdirinya lembaga – lembaga subversive yang intoleran terhadap perbedaan adalah persoalan yang harus di hadapi lembaga Bhineka Surabaya.

Organisasi yang beranggota kurang lebih 172 orang ini selalu melawan issue – issue rasial, sentiment antar umat beragama dan diskrimasi atas kaum minoritas dengan penerbitan Majalah Bhineka yang berisi tulisan penolakan atas diskriminasi kaum minoritas, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Dan beberapa kegiatan untuk mempertajam gagasan anggota Lembaga Bhineka Surabaya seperti menggelar diskusi di kampoeng ilmu, bedah film documenter dan film yang mengandung sisi sejarah seperti the Act Of killing, The Look Of silence dan Balibo 5 sebagai terapi dan upaya membangun gagasan yang lebih tajam dan konstruktif. Karna dalam bergerak dan berbicara tentu harus di dasari dengan visi misi yang jelas dan dengan gagasan tajam.

METODE

Penelitian yang di angkat pandangan Lembaga Bhineka Surabaya tentang kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai - nilai kebhinekaan oleh para anggota serta pengurus Lembaga Bhineka yang berada di Surabaya dalam pendapatnya terkait kasus penistaan agama oleh Ahok. Sehingga penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Tylor dalam metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (LJ. Maelong, 2011:4).

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dari suatu program kegiatan diskusi keberagaman suku agama ras dan budaya, maka menggunakan strategi penelitian studi kasus. Strategi Penelitian studi kasus merupakan strategi dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake: 1995 dalam crasswel, edisi ketiga: 20).

Penelitian ini berjudul pandangan Lembaga Bhineka Surabaya tentang Ucapan Ahok yang di anggap menistakan Agama. Adapun penelitian ini di laksanakan di sekretariat Lembaga Bhineka Surabaya yang berlokasi di Jl. Putro agung 2 no 6 kecamatan Kapas Krampung Surabaya. Hal ini karena lokasi lembaga Bhineka Surabaya terletak di daerah tersebut. Sedangkan sample penelitiannya adalah pengurus lembaga Bhineka Surabaya itu sendiri. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana pengurus Lembaga Bhineka Surabaya dalam menanggapi kasus Ahok yang di anggap menistakan Agama da di anggap pemimpin yang seharusnya tidak dipilih oleh umat muslim. Dan bagaimana dengan segala isu SARA yang terus di tujukan kepada salah satu Paslon dalam Pilgub DKI ini. Responden berhak memaparkan segala gagasannya dengan segala alasan yang koheren sehingga penelitian ini benar – benar actual dan dapat berguna di periode berikutnya.

Untuk pengambilan data penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sring digunakan dalam penelitian. secara bahasa yaitu berarti sengaja . Jadi, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya , peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. oleh karena itu latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud tentu juga populasinya agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan peneliti yang sehingga mendapat atau memperoleh data yang akurat. Adapun syarat – syarat dalam sampling yang akan di ambil adalah (1) Merupakan anggota aktif lembaga Bhineka Surabaya. (2) Berkontribusi secara baik di lembaga Bhineka Surabaya. (3) Selalu aktif dalam segala kegiatan yang di selenggarakan Lembaga Bhineka Surabaya.

Penelitian dalam penelitaian ini berupa data deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian tidak berupa angka dan memo dari peneliti. Moleong menyatakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data data berasal dari naskah yang berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan memo dari penulis .

Penelitian dalam penelitaian ini berupa data deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian tidak berupa angka dan memo dari peneliti. Moleong menyatakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data data berasal dari naskah yang berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan memo dari penulis .

Penelitian Pandangan anggota Lembaga Bhineka Surabaya terhadap ucapan Ahok yang di anggap menistakan Agama. karena menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang di ungkapkan diatas maka dalam instrumen penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peeliti itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa peneliti merupakan kunci dalam mencari dan memahami data yang dicari dari informan penelitian. Terdapat pada sejauh mana peneliti itu faham tentang apa yang dicari maka data yang diperoleh banyak, sebaliknya ketika peneliti itu tidak faham terhadap apa yang diteliti maka data yang diperoleh dangkal. Pengetahuan dan wawasan peneliti sangat menentukan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif tidak hanya berperan sebagai sumber data dan pengelola penelitian kualitatif.

Peneliti terjun sendiri untuk berpartisipasi dengan subjek penelitian, maka dari itu kehadiran peneliti secara langsung sangat penting dalam penelitian kualitatif, agar informasi yang didapat relevan dengan tujuan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti bersifat pasif artinya peneliti hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan tentang isu SARA yang ada di Indonesia menurut pengurus Lembaga Bhineka Surabaya

Berdasarkan jenis penelitian dan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan

wawancara mendalam (*in depth interview*) agar dapat mengumpulkan data secara lengkap dan terperinci. Tujuan dari kegiatan wawancara mendalam adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014:73).

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan secara direktif, dalam artian peneliti berusaha mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu bagaimana tanggapan anggota Lembaga Bhineka mengenai kasus Ahok yang di anggap menistakan agama. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan pada saat proses pendekatan secara emosional berhasil dilakukan oleh peneliti. Lebih tepatnya pada saat informan sudah merasa tidak asing dengan kehadiran peneliti, sehingga tanpa disadari informan dapat dengan luwes menjawab dan bercerita tentang apa yang dibutuhkan pada penelitian.

Pada teknik pengumpulan data berupa kegiatan observasi yaitu mengamati kegiatan Lembaga Bhineka dalam hal mempromosikan keanekaragaman Indonesia. Bentuk observasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah observasi terus terang. Observasi terus terang merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan berterus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan, sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Selama proses penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen penelitian baik dokumen publik maupun dokumen privat (Cresswell, edisi ke 3: 268). Dokumen public dalam penelitian ini berupa makalah, jurnal, buku dan hasil penelitian. Sedangkan data privat berupa surat, dokumen – dokumen dan foto yang dimiliki oleh anggota Lembaga Bhineka Surabaya.

Langkah pertama dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pemilihan secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Analisis data model interaktif terdapat 3 (tiga) tahap.

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2009:246). Reduksi data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan . Selanjutnya memilih hal-hal pokok

yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema. Dengan kemudian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dan mempermudah untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan.

Tahap kedua dalam analisis data model interaktif adalah penyajian data (*data display*). Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif (Sugiyono, 2013:341). Penelitian ini menyajikan teks naratif yang menggambarkan objek yang diteliti

Tahap terakhir analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013:345). Peneliti mencari data lain yang mendukung terkait dengan penelitian pandangan Lembaga Bhineka Surabaya tentang ucapan Basuki Tjahaya Purnama yang di anggap menistakan agama, supaya kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga Bhineka Surabaya

Lembaga Bhineka Surabaya yang didirikan oleh Soe Tjen Marching pada tahun 2010 adalah Organisasi nirlaba yang mengusung isu keanekaragaman tradisi, budaya, agama dan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga Bhinneka berupaya mengembangkan studi dan riset mendalam tentang keberagaman dalam tataran akademis sekaligus menjembatannya ke dalam ranah publik dan praktis.

Yayasan Bhinneka Nusantara tidak berafiliasi pada kelompok agama, ideologi ataupun etnis tertentu. Pengembangan wacana kebhinnekaan dan keanekaragaman diupayakan antara lain melalui penerbitan majalah, jurnal, buku, diskusi dan pelatihan.serta meluruskan sejarah yang telah dimanipulasi oleh penguasa (misalnya sejarah tentang pembunuhan massal 1965, pembunuhan Munir, widji

Tukkul dan tragedi '98). Lembaga Bhineka Surabaya mempunyai cabang di beberapa kota, antara lain Malang, Jakarta, Bali, Bandung, Yogya, Solo dan Samarinda. Kegiatan: (1)Majalah Bhinneka, didistribusikan gratis di 19 kota di Indonesia sejak 2010. (2)Community Building, sejak Oktober 2010. (3)Perpustakaan Umum, sejak 2011. (4)Pelatihan HAM, mulai Maret 2012. (4)Publikasi Buku, pertengahan 2012

Lembaga Bhineka sendiri sering mengadakan kegiatan social seperti diskusi keberagaman, bedah buku, bedah film dan menggelar aksi social lainnya. Untuk saat ini lembaga Bhineka Surabaya lebih menekankan pada toleransi atas keberagaman, baik keberagaman suku, budaya, agama dan lain- lain. Karna bagi para anggota lembaga Bhineka untuk saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung melakukan hal – hal yang sifatnya amoral serta stigma kepada kaum atau kelompok tertentu. sehingga rentan terjadi konflik antar kelompok ataupun ormas.

Profil Anggota Lembaga Bhineka

Dalam penelitian ini terdapat 4 orang yang akan menjadi informan penelitian, masing – masing adalah pengurus Lembaga Bhineka Surabaya.

Ricky Bram Imania adalah mantan ketua di periode tahun 2015/2016 adalah mahasiswa Universitas Surabaya asal Surabaya. Sejak berdirinya Lembaga Bhineka Surabaya beliau aktif dalam kepengurusan lembaga Bhineka Surabaya. Ricky adalah bagian dari tim redaksi dari majalah Bhineka salah satu program kerja terdepan lembaga Bhineka yaitu penerbitan Majalah Bhineka. Ricky menjelaskan bahwa Bhineka Tunggal Ika yang ada belum lah sepenuhnya dapat di terapkan dengan baik di Indonesia. Sehingga kasus SARA seperti demikian yang menjadi pemicu lembaga Bhineka di dirikan, menurut Ricky masyarakat Indonesia di nilai intolerir terhadap keberagaman atau perbedaan.

Cristofer Oktavianus adalah ketua Lembaga Bhineka Surabaya seorang mahasiswa universitas Surabaya yang baru menjabat menjadi ketua pada pertengahan tahun 2016. Sejak awal kuliah Cristofer memang gemar membaca serta mengikuti kegiatan social. Hingga pada tahun 2010 ia bergabung dengan kontras dan lembaga Bhineka Surabaya.

Ronald putra Jayawardhana adalah seorang mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Ronald merupakan anggota Lembaga Bhineka Surabaya dan kini menjabat sebagai kordinator lapangan Lembaga Bhineka Surabaya. Selain menjalani rutinitas sebagai mahasiswa, Ronald juga aktif di berbagai organisasi kampus baik intra maupun ekstra. Ronal sudah bergabung di lembaga Bhineka Surabaya sejak tahun 2014.

Sylvania adalah salah satu anggota Lembaga Bhineka Surabaya yang aktif sejak tahun 2013. Sylvania adalah mahasiswa yang duduk di semester 7 di Universitas Petra Surabaya. Sylvania atau yang akrab di panggil vani oleh rekan – rekanya sudah memiliki kegemaran dalam diskusi sejak awal perkuliahannya. Menjadi mahasiswa yang aktif di tenggah dunia glamor rkan – rekanya memang di anggap hal yang menyenangkan baginya.

Pilkada DKI dan kasus Ahok yang di anggap menistakan Agama

Februari 2017, DKI Jakarta menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan gubernur (pilgub). Kampanye berbau sara tidak terhindarkan. Jakarta seolah-olah dihuni oleh suku, agama, ras dan antargolongan tertentu. Sehingga ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengkampanyekan agar masyarakat memilih cagub yang se-suku, se-agama, se-ras dan se-golongan. Tema kampanye rasialis yang demikian tidak terlepas dari keberadaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memang kelahiran Belitung Timur, beragama Kristen Protestan dari etnis Tionghoa. Para penantang Ahok diduga sengaja memainkan isu promordial itu untuk menghentikan langkahnya merebut jabatan gubernur untuk kedua kalinya.

Diberitakan ada partai yang sudah membuat ancap-ancang mengusulkan amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, memang mensyaratkan bahwa calon presiden adalah orang Indonesia asli. Tetapi pasca amandemen, hanya mensyaratkan WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Ancap-ancang amandemen UUD 1945 tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, partai-partai ini kurang percaya diri bahwa kampanye-kampanye berbau sara itu tidak efektif menghentikan langkah Ahok menuju kursi gubernur periode kedua. Mereka khawatir pemimpin dari kelompok minoritas bisa jadi pemimpin masyarakat dari kelompok mayoritas.

Kedua, partai-partai ini khawatir, dengan posisi gubernur, popularitas Ahok akan semakin berkibar menjelang pilpres 2019. Popularitas Ahok yang demikian, bisa jadi dasar bagi partai-partai pendukungnya saat ini untuk mengusung Ahok jadi RI 1 atau setidaknya RI 2 pada pilpres nanti. Hal ini juga di pertegas mengenai kampanye SARA di Indonesia yang mengusung issue hangat seperti agama dan ras. Berikut cuplikan wawancara dengan Ricky bram Imania mengenai Bhineka Tunggl ika dalam kitab sutasoma dan lambang Negara :

“Berkali-kali Ahok menekankan bahwa dia adalah orang Indonesia. Seakan dia

harus berjuang hanya untuk mendapat pengakuan untuk hal yang satu ini. Beberapa kecaman tentang Ahok bertebaran, menyebut dia Cina dan mempertanyakan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia. Apa sebenarnya arti kata ‘Cina’ di Indonesia? Kebanyakan menyebutkan, orang Cina pantas disebut demikian karena nenek moyang mereka berasal dari Cina, bukan dari Indonesia. Inilah yang tidak terjadi pada Marissa Haque, yang nenek moyangnya juga tidak berasal dari Indonesia. Tidak ada yang meragukan nasionalismenya, dengan menyebut dia sebagai orang Pakistan atau India. Padahal, jelas sekali dia menyatakan bahwa kakek dan ayahnya bukan orang Indonesia. inilah diskriminasi yang masih mengakar, dan seringkali tidak disadari di Indonesia”

Dalam diskusi-diskusi di ruang publik, para elite politik kita, entah disadari atau tidak, mereka menggantungkan atau mengaitkan berlakunya hak untuk bebas dari diskriminasi itu pada suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu dan golongan tertentu. Akibatnya mereka menghubungkan berlakunya hak untuk bebas dari diskriminasi itu dengan soal mayoritas dan minoritas dalam pemilihan pejabat publik. Yang muncul kemudian adalah salah kaprah, seolah-olah jabatan publik itu adalah berkat kebaikan hati kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini rasa superior yang dimiliki oleh kaum mayor di anggap Ricky masalah besar yang membuat kaum mayoritas memiliki kebebasan menindas kaum minoritas. Ahok di anggap kaum pendatang yang harus tau diri dan mengikuti alur game plan kaum mayoritas. Berikut wawancara dengan Ricky :

“Apa arti Cina itu sendiri? Cina yang mana? Sedangkan, garis perbatasan negara selalu berubah-ubah. Yang dinamakan Cina sekarang bukanlah lagi Cina yang dulu. Ada Taiwan dan RRT, yang keduanya disebut Cina, namun dengan ideologi yang cukup berbeda. Kalau kita menganggap bahwa suku Han adalah etnis Cina yang asli, etnis yang dianggap asli pun sudah banyak tercampur oleh darah Mongolia karena penjajahan bertubi-tubi. Sedangkan orang Cina yang tinggal di sebelah Barat, juga telah bercampur dengan mereka-mereka yang tinggal di perbatasan Kazahktan dan Afganistan. Karena itulah di bagian itu, banyak orang yang berhidung mancung dibanding yang lain. Bila kita menganggap murni sebagai yang lebih tua, sebenarnya sebagian nenek moyang

penduduk Nusantara asalnya dari Yunan (Cina Selatan). Dari ketiga pengurus lembaga Bhineka Tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa ketiganya memiliki kesamaan dalam memaknai”

Ricky menekankan bahwa Seringkali permasalahan yang menyangkut issue SARA membuat persoalan dalam negeri semakin kompleks dan semakin meruncing. Kesadaran akan semangat persatuan di Indonesia semakin meredup. Bukti nyata tentu terjadinya kampanye yang mengusung isu SARA sebagai senjata dalam menghimpun suara dalam skala yang lebih besar. Dalam jangkauan yang lebih luas sebenarnya sudah banyak kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dan tentunya ini menggambarkan realitas yang terjadi di Indonesia bahwa Negara Indonesia masih minim kesadaran akan membangun rasa persatuan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sylvania juga berpendapat bahwa eksploitasi antar umat beragama sudah sering terjadi. Sebelum Ahok mengutip Al Maidah 51 Ahok justru lebih dulu di diskriminasi dan di serang isu SARA. Demikian kutipan wawancara dengan Sylvania :

“Negara Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan agama. Kita hidup berdampingan dengan hak yang sama sebagai rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya. Itulah cara kita hidup selama ini, sejak negara ini berdiri sampai sekarang. Setiap agama punya hari raya dan ritual keagamaan yang berbeda-beda, dan semuanya sudah mendapat jatah perayaan dari negara. Semua ummat beragama juga punya hak merayakan. Jika ada pihak-pihak yang menghalangi atau membubarkan sebuah perayaan, maka itu melanggar undang-undang dan kesepakatan kita sebagai warga Indonesia. Salah satu kebaktian natal setiap tahun rutin diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha Bandung. Sekali lagi setiap tahun. Sudah berjalan 15 tahun. Namun baru hari ini acara tersebut dibubarkan oleh ormas atas nama Islam bernama Pembela Ahlu Sunnah (PAS). Mereka ormas PAS ini masuk ke dalam Gedung Sabuga dan membubarkan kebaktian natal. Hanya diberi waktu sekitar 10 menit untuk menyalakan lilin dan itupun diawasi, kemudian diminta bubar. Itupun masih dengan suara-suara provokatif dan penuh intimidasi, diteriaki. Selain ritual keagamaan tidak semuanya bisa dilaksanakan, saudara-saudara kita jadi otomatis merasa ketakutan.”

Dalam kasus di atas Sylvania menganggap banyak sekali kasus SARA yang jelas sudah mengganggu kebebasan orang untuk beribadah namun

semua orang di anggap pura – pura tuli atas keadaan yang ada. Sedangkan Ahok yang mengutip Al Maidah 51 semua orang ramai meminta Ahok di tahan. Bagi Sylvania ini sebuah bentuk penindasan atas kaum minoritas

Cuplikan video saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok sedang berbicara di hadapan warga mendadak viral di internet. Cuplikan video itu ditemukan di Facebook maupun YouTube. Cuplikan video beberapa detik itu menjadi viral karena pada kesempatan itu Ahok dianggap menistakan agama Islam dengan menyebut warga dibohongi dengan Alquran Surat Al-Maidah ayat 51. “Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam gitu. Itu hak bapak ibu, nggak bisa dipilih nih karena saya takut neraka. Nggak papa. Karena itu panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak, dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok,” kata Ahok dalam cuplikan video itu.

Kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu terkait program kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan. Pada kesempatan itu, Ahok melakukan serangkaian aktivitas budidaya ikan di beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Salah satu program yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Kepulauan Seribu adalah program tambak ikan. Disebutkan jika pada program itu, bagi hasil antara warga dan Pemprov DKI itu akan menguntungkan warga. Pembagiannya adalah 80 persen untuk warga dan 20 persen untuk Pemprov DKI. Dalam percakapan dengan mas Ricky, dengan tegas ia menyatakan bahwa yang sudah di ucapkan Ahok di pulau seribu merupakan ungkapan edukasi politik dan jauh dari ungkapan yang mengandung SARA ataupun penistaan agama. Demikian cuplikan wawancara dengan Ricky :

“Saya kadang heran, saat Ahok mengatakan kalimat yang di anggap melecehkan agama Islam, Mengapa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keras ini tidak diganjar dengan undang-undang penodaan agama? Fatwa telah dipakai orang-orang tersebut untuk melarang, menista dan menghukum yang lain. Padahal arti fatwa dalam bahasa Arab adalah anjuran atau pendapat, jadi bila tidak dituruti, seharusnya tidak ada sangsi. Mengapa mereka-mereka ini tidak dianggap menyelewengkan agama? Orang-orang ini juga yang dengan lantang memaki yang lain dan bahkan tidak segan menggunakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan menggunakan kata jihad? Padahal, jihad menurut beberapa tafsir adalah pertarungan habis-habisan dengan diri dan batin sendiri, bukan dengan orang lain.”

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi selogan Bhineka Tunggal Ika, pemerintah harus mengambil langkah serta sikap yang lebih objektif. Siapapun yang melakukan tindakan diskriminasi sudah selayaknya di hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya di Indonesia, di Negara lain yang bahkan lebih maju daripada Indonesia juga masih banyak kasus SARA yang tak lepas dari peran tokoh Agama dan pemerintah. Keadaan yang di anggap menodai agama atau melecehkan agama bisa saja di anggap sebagai senjata untuk menghilangkan hak serta nyawa manusia lain. Cristoper juga menjelaskan bahwasanya banyak kasus serupa dengan yang dilakukan Ahok, terutama oleh kaum mayritas di suatu Negara. Sehingga suatu kaum memiliki kebebasan secara moral untuk mendiskriminasi serta mengintimidasi kaum lainnya. Demikian cuplikan wawancara dengan Cristoper :

“ Di Eropa, pada tahun 1480 sampai 1700, diperkirakan sekitar 40 ribu hingga 100 ribu perempuan dikorbankan hanya karena dituduh menodai agama, hanya karena mereka mempunyai kucing hitam atau mempunyai tahi lalat di tempat yang salah. Dan di Indonesia, lebih dari 2 juta orang digorok pada awal masa Orde Baru, karena mereka dituduh sebagai komunis atau orang-orang yang telah menodai agama. Berapa banyaknya korban tak bersalah yang sudah dikorbankan hanya karena mereka dianggap menodai agama dan Tuhan? Masih ingat masa Orde Baru yang memopulerkan kata asbun (asal bunyi)? Kebebasan bersuara, menurut mereka boleh-boleh saja, tapi yang menentukan seberapa bebasnya adalah sang penguasa. Bila ada yang bersuara mengkritik pemerintah maka ini dinamakan asal bunyi. Orde Baru juga yang begitu getol dengan istilah SARA (suku, agama, dan ras). Apa saja yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah disebut SARA. Bila ada diskusi tentang agama atau etnis, disebut SARA. Padahal yang SARA adalah pemerintah sendiri Tapi, justru inilah enaknya pihak yang berkuasa: Bisa menjadi maling yang berteriak maling. Setan yang berteriak setan.”

Jika umat manusia dengan agamanya, kemudian mengembangkannya, itu sudah menjadi fitrah manusia. Sebab semua orang beragama merasa wajib untuk mengembangkan dan menyampaikan keyakinannya kepada siapapun di dunia ini. Di sinilah letaknya sebuah toleransi, siapapun umat beragama bebas untuk mendakwahkan agamanya dan siapapun manusia bebas menerima maupun menolak ajakan itu. Rambu-rambu untuk itu dalam tatanan hidup antarbangsa dan agama telah dimiliki oleh umat dan bangsa sedunia. Sikap

toleran akan dapat meminimalkan segala konsekuensi negatif penyebaran agama.

Sesuatu yang menjadi sangat penting dan terpenting adalah tertanamnya suatu sikap bagi seluruh umat beragama, bahwa tujuan dasar beragama adalah tercapainya kebahagiaan (kedamaian) dunia maupun dalam kehidupan setelah dunia, kiranya sesuatu yang sangat esensial ini tidak ternodai oleh perselisihan justru atas nama kesejahteraan dunia akhirat tersebut, hal yang sangat ironis jika hal itu justru yang dikedepankan dalam sikap hidup umat beragama. Sekali lagi sikap toleransi yang dapat mengatasinya. Hal ini juga di sampaikan oleh Ricky yang juga menyatakan pendapatnya dalam wawancara berikut :

“Padahal, semua agama di Indonesia saat ini tumbuh sebagai interpretasi yang berbeda dari agama sebelumnya – bukankah Kristen adalah interpretasi dan bahkan kritik dari agama Judaisme? Begitu juga Buddha, yang memberi interpretasi lain dari agama Hindu, sehingga kasta-kasta dihapuskan. Dan agama-agama modern di Indonesia saat ini kebanyakan adalah produk impor, yang menggantikan agama-agama lokal di Nusantara, dan bahkan mengkritik interpretasi agama lokal yang kebanyakan berdasarkan pada animisme, pantheisme dan politeisme. Bila Undang-undang ini secara konsekuen diterapkan, berarti semua umat beragama di Indonesia bisa dituntut karena telah melanggar pasal 1. Memang, evolusi agama, kebenaran dan moralitas adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena pengetahuan tidak pernah mati. Namun, anjuran Iqra, untuk membaca, untuk menggali dan mencari sudah ditiadakan oleh orang-orang yang merasa berpegang pada dogma yang benar.”

Kebenaran agama secara Absolut seringkali di jadikan alat untuk mengais keuntungan di sela-sela gejolak masyarakat tentang kasus Ahok. Banyaknya tokoh agama yang menuntut Basuki Tjahaya Purnama untuk di tahan membuat perebutan kursi politik di ibu kota semakin memanas. Di Negara ukum pancasila dan UUD 1945 haruslah di atas aturan apapun, hal ini yang kemudian beberapa oknum kurang sepakat. Hal ini di tegaskan Ronald dalam cuplikan wawancara berikut:

“Kita hidup di Indonesia sudah seharusnya kita patuh pada aturan undang – undang yang ada. Bukanya masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama? Lha kenapa kok gara – gara Ahok bukan muslim, ahok cina jadi masalah untuk maju di pilgub DKI nanti? Gimana orang bisa menilai kapasitas seseorang Cuma dari suku atau agama. Saya rasa

alasan itu kurang masuk akal mas. Indonesia yang mayoritas muslim dahulu rela mengambil selogan yang kata bahasanya sansekerta yang waktu itu bercorak hindu budha. Kenapa sekarang Cuma gara – gara ahok non muslim seolah – olah di persulit untuk maju di pilgub DKI.”

Setelah di unggahnya video berdurasi 31 detik yang di unggah oleh Buni Yani terlihat rekaman perkataan Ahok di pulau Seribu serentak mengundang kemarahan kalangan umat muslim di berbagai daerah. Dalam video tersebut Ahok mengatakan bahwa masyarakat telah di bodohi dengan menggunakan surat AL- maidah Ayat 51. Ahok diduga telah melakukan penistaan terhadap kitab suci Al-Qur'an yang telah menyinggung dan melukai hati umat islam dengan menyebut surat Al- Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi warga dalam kaitannya memilih tipe pemimpin di hadapan warga Kepulauan Seribu akhir September lalu. Berikut tanggapan Sylvania mengenai Ahok yang di anggap menistakan Al maidah :

“Perlu kita ingat kembali bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum, Negara Indonesia bukan Negara islami, artinya adalah terdapat agama lain selain agama islam maka dari itu tidaklah rasional ketika aturan Almaidah 51 yang membuat Ahok harus mengundurkan diri dari PILKADA. Almaidah adalah ayat yang tercantum pada salah satu agama yaitu islam, maka oleh karena itu ayat tersebut hanya berlaku untuk umat islam, tetapi tidak untuk agama lain. Meski begitu kita kembali ke kalimat awal bahwa Indonesia adalah Negara hokum bukan Negara islami, bukan berarti di Indonesia mayoritas terbanyak adalah umat islam maka semua agama harus mengikuti aturan islam.”

Demo 4 November atau Aksi Bela Islam II diikuti ratusan ribu orang. Tuntutan utama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI adalah Basuki Tjahaja Purnama segera diproses secara hukum. Kini, aksi 2 Desember, tuntutan bergeser lebih jauh agar Ahok segera ditahan. Tetapi tanpa mengubah tuntutan aksi yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan dan target Habib Rizieq Shihab yaitu supaya Ahok di tahan, Dewan Pembina GNPF MUI, setelah membuat kesepakatan dengan Kapolri Tito Karnavian, di Kantor MUI. Meski tetap keras dengan tuntutanannya, Rizieq mencoba mengapresiasi Kapolri yang telah memproses hukum Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama secara profesional.

Namun tampaknya Rizieq belum puas. Dia meminta agar Kejagung segera mem-P21 perkara tersebut. Tujuannya, perkara bisa segera disidangkan agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Karena masalah ini di anggap sudah menyebabkan kegaduhan bahkan heboh internasional. Bagi Rieziesq Ini tidak boleh diulur waktu, rieziesq berharap segera ada keputusan. Rieziesq meminta kejaksaaan juga untuk melakukan penahanan. Polri sebenarnya telah menjawab tuntutan GNPF MUI dalam demo 4 November. Polri melakukan gelar perkara penyelidikan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Tak tanggung-tanggung, dihadirkan 20 saksi dari berbagai keilmuan. Gelar perkara itu, pelapor dengan saksi ahli dihadirkan. Ahok dengan saksi ahli juga dihadirkan. Ternyata tak membutuhkan waktu lama bagi polisi untuk menentukan status Ahok.

Sehari kemudian, Bareskrim Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka. Ahok dijerat dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya, berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Sementara Pasal 156a KUHP menyebut pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dua minggu setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkas perkara Ahok dilimpahkan oleh Bareskrim ke Kejaksaan Agung.

Sehari kemudian, Ahok mendatangi Mabes Polri untuk diantar ke Jaksa Penuntut Umum. Diumumkan bahwa Ahok akan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini mendapat tanggapan dari beberapa anggota lembaga Bhineka Surabaya, Cristofer juga menjelaskan bagaimana video viral itu bisa mengundang amarah kaum muslim sampai saat ini Ahok di tetapkan sebagai tersangka. Berikut cuplikan wawancara dengan Cristofer:

“Video orisinil yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah full, artinya tidak ada pengeditan/pemisahan video berdurasi 1 jam 40 menit menjadi beberapa video. Dalam video tersebut ada kata “pakai”. Logikanya jika ada dugaan penistaan agama, pasti video yang diunggah Pemprov DKI tersebut akan menjadi viral di dunia maya karena banyak yang menonton video pidato Ahok. Logika

selanjutnya adalah saksi-saksi yang mendengar langsung pidato Ahok jika mendengar ada dugaan penistaan agama ketika Ahok berpidato, maka pasti langsung timbul gejolak dan dengan cepatnya menyebar melalui media sosial. Tetapi fakta telah membuktikan saat Ahok berpidato tak ada gejolak apapun dari saksi-saksi yang mendengar langsung pidato Ahok setelah, dan gejolak baru muncul setelah video itu diunggah dan ditranskrip oleh Buni Yani.”

Pada kasus pengunggahan video oleh Buni Yani, Pihak kepolisian memutuskan tak menahan Buni Yani meski telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). polisi memutuskan tidak menahan Buni karena alasan subyektif dan obyektif. Dari unsur subyektif, polisi berkeyakinan Buni tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ini dikarenakan semua barang bukti dalam kasus tersebut sudah disita polisi. untuk alasan obyektif, Buni dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Berikut tanggapan Ronald atas beredarnya Video yang di unggah oleh Buni yani :

“Alasan Buni Yani yang mengatakan bahwa video itu hanya diunggah ulang dari sebuah tautan adalah menimbulkan tanda tanya besar yang perlu didalami yakni jika Buni Yani hanya mengunggah ulang video yang berasal dari sebuah akun yang disebar lewat tautan yang telah lebih dulu mengunggah video tersebut di media sosial , bagaimana logikanya kehebohan ditengah masyarakat baru terjadi pada 6 Oktober setelah diunggah Buni Yani serta mengapa tidak ada kehebohan dan laporan yang masuk terkait sebuah akun yang mengunggah video pidato Ahok. Padahal logisnya, jika benar ada dugaan penistaan agama pada sumber video (pada tautan dari sebuah akun) yang dijadikan sebagai dalil Buni Yani, maka mestinya sebelum tanggal 6 (sebelum video diunggah ulang Buni Yani mestinya ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian dengan menjadikan bukti video dari tautan dan pemilik akun tersebut sebagai bukti adanya dugaan penistaan agama. Tapi yang terjadi justru tak ada kehebohan apapun setelah video diunggah melalui tautan tersebut. Begitu sederhana logika dalam kasus ini.”

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun telah meminta maaf kepada seluruh Umat Islam sekaligus mengakui kehilafannya. Menurutnya ia tak bermaksud sedikit pun menyinggung terlebih memusuhi Islam. Bahkan akibat perkataannya ia sudah pula di demo dengan ribuan atau bahkan jutaan masa yang tumpah ruah

memenuhi Ibu kota Jakarta. Bahkan aksi juga berlangsung di beberapa penjuru tanah air. Demo yang ricuh itu alih-alih menyalahkan penyusup yang memancing kerincuan namun tetap saja logika publik seakan dipaksa Ahok yang bersalah, Ahok yang harus bertanggung jawab. Oleh karena Ahok biang keladi yang menyebabkan gelombang aksi protes itu. Kalau Ahok tidak melontarkan kata-kata nista itu, tidak akan terjadi demo dan tidak akan ada pula kericuhan. Dan semoga saja ini menjadi pelajaran bagi Ahok dan semua agar berhati-hati dalam berucap terutama jika berhubungan dengan hal-hal yang dipandang sakral (suci) bagi setiap pemeluk agama. Berikut wawancara dengan Ricky :

“ Habib Riezeq menyatakan, tidak cukup Ahok ditetapkan sebagai tersangka, tetapi polisi seharusnya menahannya, alasannya demi kepentingan penyidik Polri, dan juga, katanya, seolah-olah bersimpatik dan memperhatikan keselamatan Ahok, demi kepentingan Ahok sendiri. Sebab di sel tahanan Polri, Ahok lebih aman. Padahal kalau mau jujur, bilang saja, MUI mau Ahok ditahan, supaya peluangnya untuk menang semakin kecil, dan Agus Yudhoyono yang didukung MUI berpeluang lebih besar menang Pilgub DKI 2017. mereka juga mengatakan penetapan Ahok sebagai tersangka itu pasti akan mengerus secara signifikan suara pemilihnya, sehingga akan Ahok-Djarot pasti akan kalah di Pilgub DKI ini. Predeksi saya justru sebaliknya, penetapan Ahok sebagai tersangka ini justru akan semakin membuat para pendukung Ahok, para simpatisan, dan masyarakat pemilih yang selama ini belum menentukan pilihannya, pasti akan semakin bersimpatik kepada Ahok yang jelas-jelas dizolimi pihak-pihak tertentu yang menunggangi kasus tersebut demi kemenangan mereka di Pilgub DKI ini.”

Ricky menjelaskan bahwa isu seperti ini yang membawa nama Al quran serta Agama memang sering di pakai actor politik untuk melumpuhkan lawanya. Perbedaan lawan politik yang di rasa memiliki kapasitas dalam membangun perbahan di anggap bisa di kalahkan lewat pengalihan isu SARA namun dengan tegas Ricky menilai pernyataan Ahok bukanlah penistaan Agama. berikut cuplikan wawancara dengan Ricky :

“Itu sudah banyak yang pakai cara begituan. Hal yang lebih mudah kita amati adalah Prof. Dr. Amien Rais selaku ketua MPR tahun 1999 juga pernah memanfaatkan berbagai dalil di dari Al Qur'an dan Hadist untuk menggagalkan Megawati menjadi presiden, lalu satu setengah tahun kemudian bisa-bisanya

kembali menggunakan ayat-ayat suci Al Qur'an dan hadist-hadist Nabi untuk memungkinkan perempuan menjadi pemimpin, karena dianggap presiden bukanlah pemimpin agama, demi menyingkirkan Gusdur? Kok bisa? Ya bisalah! Bisa-bisanya orang ingin memanfaatkannya untuk apa. Apakah Al-Qur'an atau hadist-nya yang berubah-ubah? Tentu tidak, tapi karena orang yang memanfaatkannya memiliki kepentingan yang berubah-ubah. Karena pada kenyataannya memang surat tafsir, ayat suci, agama apapun, nama Tuhan, bisa saja dipergunakan aktor-aktor tertentu untuk membodohi masyarakat yang enggan atau malas berpikir dengan kepalanya sendiri. Lalu bagaimana anda tau kalau sedang dibodohi atau tidak? Dari jargon-jargonnya saja, demo 4 November kemarin dikatakan adalah untuk bela Quran, bela Islam, bela Tuhan...?? Lalu demonya bukan di depan kantor Gubernur, tapi di depan istana?? Ya saya sendiri juga gak tau tapi yang pasti baik dilihat dari kondisi Negara yang merupakan Negara hukum dan dari tatanan bahasa saya rasa pidato Ahok tidaklah menistakan agama.”

Dari semua pernyataan di atas dapat di cermati bahwa Ronald menganggap kasus Ahok yang di anggap sebagai penista agama hanyalah agenda politik untuk kepentingan suatu golongan tertentu, Ronald menilai kaum mayoritas di Indonesia lebih mmiliki ke leluasaan dalam menindas dan menunjukan sisi superiornya di Negara yang berselogan Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana mestinya di Negara yang multikultur. Hak dan kewajiban yang di miliki masing –masing pemeluk agama adalah sama di mata Negara dan hukum. Namun dari masa Orde Baru, dimana kasus sara seringkali di ciptakan untuk melanggengkan kedudukan pemerintah di masa itu, diskriminasi atas kaum tionghoa sampai kaum yang di anggap kafir adalah dampak nyata dari manifestasi kekuasaan masa itu, yang di masih bisa di rasakan sampai saat ini.

Para informan menilai, perkataan Ahok di pulau Seribu bukan merupakan suatu tindakan yang menisakan agama. Karna para informan melihat dari kedua video yang ada, baik video asli ang di unggah oleh Pemprov DKI dan juga Video yang di unggah oleh Buni Yani sangatlah berbeda. Para informan menganggap video yang asli tidak ada satu katapun yang membuat Ahok bisa di anggap menistakan Agama. Karna ahok di nilai tidak mengatakan AL maidah 51 “bohong” tetapi Ahok lebih menekankan pada orang yang membohongi menggunakan AL Maidah 51.

Anggota Lembaga Bhineka juga mengharapkan bahwasanya kontestasi pilgub DKI akan menjadi ajang pemilihan yang terbaik dari ang terbaik. Para anggota Bhineka Surabaya menaruh harapan nantinya warga memilih pemimpin dari eleabilitas serta kinerjanya bukan karna satu suku, agama, ras atau satu golongan.

Pandangan anggota Lembaga Bhineka Surabaya tentang Pidato Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di pulau Seribu yang di anggap menistakan Agama. Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya adalah pegiat aksi social. Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya mencoba mencermati perkataan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk mendiagnosa kasus ini sehingga dapat menarik kesimpulan bahwasanya kasus ini adalah penistaan agama atau bukan.

PEMBAHASAN

Pendekatan Makna Referensial

Dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai lebel atau julukan, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Terdapatnya julukan simbolik dalam kesadaran individual itu, lebih lanjut memungkinkan manusia untuk menyusun dan mengembangkan skema konsep.

Di Kepulauan Seribu, Ahok mengatakan. “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.” Dalam makna bahasa secara referensial kata kuncinya adalah “di bohongi”, orang “,” pakai“, “Al maidah 51” secara referensial makna kata – perkata tersebut tidaklah memiliki makna ganda ddalam penggunaanya. Kata “di bohongi” secara referen mengacu pada arti telah tertipu. kemudian kata “orang” secara referen adalah manusia. Sedangkan kata “pakai” secara referen adalah mengenakan atau menggunakan. Dan kata Al Maidah 51 secara referen mengacu pada salah satu ayat suci Al Quran. Dalam pendekatan makna kata referensial kata – kata tersebut seluruhnya adalah jenis kata referensial yang hanya memiliki makna tunggal. Sehingga dalam kalimat yang di utarkan Ahok di pulau seribu, di anggap tidak menyimpan mkana lain selain yang tertera di atas

Pendekatan Makna Ideasional

Dari Pendekatan Makna Ideasional. Dalam fase ini lebih menekankan pada konsep atau tata letak bahasa yang di ucapkan Ahok. “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.” Pada kalimat yang di ungkapkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), para anggota Lembaga

BHineka Surabaya memaknai itu sebagai kalimat yang sederhana dan bukan merupakan kalimat yang menggunakan *privat language*. Melainkan bahasa sehari – hari yang di pakai. Dalam tata bahasa Ahok yang demikian para anggota lembaga Bhineka surabaya meyakini tidak ada unsur penistaan agama di dalamnya, karna Ahok mengatakan “di bohongi pakai surat Al Maidah 51”. Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya berpendapat bahwa yang di permasalahan Ahok bukanlah surat Al maidah 51 melainkan perlakuan orang yang memiliki tujuan pragmatis dengan menggunakan Al Maidah 51.

Namun setelah di unggahnya video oleh Buni Yani dan sudah melewati proses editing, di dalam video yang berdurasi kurang lebih 31 detik itu Ahok mengatakan “di bohongi surat Al Maidah 51. Tentu dalam video yang di unggah oleh Buni Yani menjadi viral dan mengundang kemarahan bagi umat muslim di tanah air. Karna di video asli Ahok mengatakan “di bohongi surat Al Maidah ayat 51” dan video kedua “dibohongi surat Al Maidah ayat 51. Meski hanya satu kata yang di hilangkan tapi ini dapat merubah penyampaian pesan secara ideasional.

Di video pertama tentu yang ingin di sampaikan Ahok adalah “jangan mempercayai orangnya” sedangkan di video kedua karna telah di hilangkan kata “pakai” tentu memilii arti yang berbeda yaitu “jangan percayai Al Maidah “. Di dalam pendekatan makna ideasional penempatan kata sangatlah berpengaruh dalam merubah isi pesan yang akan di sampaikan. Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya meyakini bahwasanya dalam kasus ini bukan lah Ahok yang harusnya menjadi tersangka dalam menistakan agama, melainkan Buni Yani yang harus bertanggung jawab karna mengedit video yang dapat memicu kasus SARA.

Pendekatan Makna Behavioral

Dari Pendekatan Makna Behavioral. Dalam fase ini para anggota lembaga Bhineka suarabaya menilai ucapan Ahok dari sisi situasi dalam berbicara. Dalam situasi dan kondisi Negara Indonesia sebaga Negara hukum. Anggota Lembaga Bhineka Surabaya menilai Perkataan Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) yang berbunyi “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.” Bukanlah penistaan agama. Melainkan sebuah edukasi politik. Karna di lihat dari apa agamanya, apapun sukunya memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia. Para anggota lembaga Bhineka Surabaya juga berpendapat bahwa saat Ahok berkata demikian di pulau seribu, tidak ada masyarakat pulau seribu yang merasa di hina, di lecehkan atau di nistakan. Namun lain halnya dengan keadaan di luar kepulauan seribu. Masyarakat beramai menuntut Ahok untuk di tahan setelah video yang di unggah Buni yani menyebar ke media social.

Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya menganggap tidak ada masalah sampai beberapa hari setelah pidato Ahok di kepulauan seribu. Masalah justru datang dan viral setelah video itu mengalami editing oleh Buni Yani. Karna dalam editing itu sendiri di anggap mengalami sedikit perubahan namun mengubah makna secara mendalam. jika di dalam Negara hukum seperti Indonesia ungkapan Ahok yang berbunyi “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.” Bukan lah suatu penistaan agama.

Menurut lembaga Bhineka Surabaya kalimat itu justru mengandung edukasi politik. Namun jika di dalam video yang di unggah oleh Buni Yani. Ahok mengatakan “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.” Dalam pernyataan ini Ahok seolah menghujat Al Maidah 51. Pernyataan seperti ini baik di Negara hukum sekalipun di anggap menistakan Agama. Sehingga dalam fase makna dalam pendekatan behavioral. Ungkapan ahok di video asli bukanlah merupakan penistaan agama sedangkan video yang di unggah Buni Yani ungkapan Ahok dapan di katakan melecehkan agama islam.

PENUTUP **Simpulan**

Pandangan anggota Lembaga Bhineka Surabaya tentang Pidato Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di pulau Seribu yang di anggap menistakan Agama. Dalam pendekatan ini di lalui 3 fase yaitu makna dalam pendekatan referensial, ideasiobal dan behavioral. Dalam pendekatan makna kata referensial, kata – kata yang di ucapkan oleh Ahok seluruhnya adalah jenis kata referensial yang hanya memiliki makna tunggal. Sehingga dalam kalimat yang di utarakan Ahok di pulau seribu, di anggap tidak menyimpan makna lain selain yang tertera

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ideasional. Dalam fase ini lebih menekankan pada konsep atau tata letak bahasa yang di ucapkan Ahok. para anggota Lembaga BHineka Surabaya memaknai itu sebagai kalimat yang sederhana dan bukan merupakan kalimat yang menggunakan *privat language*. Melainkan bahasa sehari – hari yang di pakai. Dalam tata bahasa Ahok yang demikian para anggota lembaga Bhineka surabaya meyakini tidak ada unsur penistaan agama di dalamnya, Para anggota Lembaga Bhineka Surabaya berpendapat bahwa yang di permasalahan Ahok bukanlah surat Al maidah 51 melainkan perlakuan orang yang memiliki tujuan pragmatis dengan menggunakan Al Maidah 51.

Di fase terakhir adalah pendekatan behavioral. Dalam fase ini para anggota lembaga Bhineka suarabaya menilai ucapan Ahok dari sisi situasi dalam berbicara. Dalam situasi dan kondisi Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Anggota Lembaga Bhineka Surabaya menilai Perkataan Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) Bukanlah penistaan agama. Melainkan sebuah edukasi politik. Karna di lihat dari apa agamanya, apapun sukunya memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.

Saran

Di Indonesia yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan tertera dalam selogan bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika sudah semestinya mentolerir perbedaan dan meninggalkan sisi superior bagi siapapun yang menganggap dirinya sebagai mayoritas. Seringkali di Indonesia menjastifikasi seseorang tidak pancasilais atau tidak mejunjung kebhinnekaan namun kenyataanya dirinya sendiri yang intoleran kepada kaum minoritas lainnya. Siapapun yang berkuasa atau golongan apapun yang menjadi sebuah mayoritas di suatu Negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban di Indonesia.

Dengan di gelarnya ajang pemilihan calon gubernur di DKI Jakarta di harapkan masyarakat Jakarta lebih obyektif dalam menentukan pilihanya. Di harapkan masyarakat Jakarta memilih pemimpin dari bagaimana kinerja dan *trac record* nya. Dari bagaimana pemimpin memang benar – benar bisa mengajak masyarakat kearah yang lebih baik. Bukan sekedar memilih hanya karna se suku, agama, rasa tau satu golongan

DAFTAR PUSTAKA

- Bennet, C.I. 1995 *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*. Boston: Allien and Bacon.
- Fay, B.1996 *Contemporary Philosophy of Social Science: a Multicultural Approach*.Oxford:Blackwell.
- Glazer, N.1997 *We are All Multiculturalists Now*. Cambridge, Mss.: Harvard University Press..
- Jary, D., dan J. Jary 1991 *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. Hlm.319.
- Jhon Lyons sistemathics 1977, Cambridge university press.
- Karimurti kridalaksana, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1990 *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997 *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014,
- 2012.*Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Nieto, S. 1992 *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Nitibaskara, N 2001 'Mencegah Konflik Kekerasan Antar Etnis', *Kompas*, 3 April.
- Odgen and Richard, 1923 *the meaning of meaning*, cambridge press
- Suparlan 2001d 'Ethnic and Religious Conflict in Indonesia', *Kultur: The Indonesian Journal for Moslem Culture* 1(2):30–41.
- Suparlan. 2001a Ksetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat majemuk Indonesia.Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- Suparlan. 2001b Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsukubangsa. Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- Suparlan. 2001c Hak Budaya Komuniti dalam Kerusuhan Antarsukubangsa. Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- Suparlan. 2001e Konflik Antarsukubangsa dan Purifikasi. Makalah dalam Seminar 'Konflik Etnik dan Naluri Nativistik di Indonesia', Perhimpunan Indonesia Baru dan Asosiasi Antropologi Indonesia. Jakarta, 22 Mei.
- Supralan . 2000 'Masyarakat Majemuk dan Perawatannya', *Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA* 63(24):1–14.

